



Analisis Implementasi Program Tiga Juta Rumah Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

INFO PENULIS

Nailah Fakhriyah Saputra
Universitas Muhammadiyah Jakarta
nailahfakhriyah72@gmail.com

Abdul Rahman
Universitas Muhammadiyah Jakarta
abdul.rahman@umj.ac.id

Raden Suryo Putro Nugroho
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
RadenSuryPutroNugroho@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Saputra, N. F. Rahman, A., & Nugroho, R. S. P. (2025). Analisis Implementasi Program Tiga Juta Rumah Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5336-5341.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Tiga Juta Rumah Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, hingga studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sudah mulai memberikan dampak positif melalui peningkatan penyaluran pembiayaan subsidi dan perluasan akses hunian bagi MBR. Namun, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan lahan, ketidakseimbangan anggaran, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta belum meratanya ketepatan sasaran. Temuan ini menegaskan bahwa percepatan program membutuhkan penguatan tata kelola, sinkronisasi data, dan penyederhanaan birokrasi agar target pembangunan perumahan dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci: Backlog, FLPP, MBR, Program Tiga Juta Rumah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Three Million Houses Program as an effort to meet the housing needs of low-income communities. The approach used was descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews and literature studies. The results indicate that the Three Million Houses Program has begun to have a positive impact through increased distribution of subsidized financing and expanded access to housing for low-income families (MBR). However, its implementation remains hampered by limited land, budget imbalances, suboptimal cross-agency coordination, and uneven targeting. These findings emphasize that program acceleration requires strengthened governance, data synchronization, and bureaucratic simplification to effectively achieve housing development targets.

Key Words: Backlog, FLPP, MBR, Three Million Homes Program

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat dan pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan meningkatnya tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Di antara kebutuhan tersebut, ketersediaan papan atau hunian menjadi perhatian utama. Penyediaan tempat tinggal menjadi isu krusial karena berperan penting dalam mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki hunian maupun yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak. Terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kebutuhan hunian menjadi isu yang semakin mendesak. Kelompok ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan finansial sehingga membutuhkan dukungan dan intervensi pemerintah untuk dapat mengakses rumah yang layak dan terjangkau.

Di Kuala Lumpur Malaysia, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjalankan berbagai program perumahan seperti Program Rumah Ikram, Program Rumah Transit, Program Perumahan Rakyat Dimiliki, serta Program Perumahan Rakyat Disewa (Rameli, 2022). Di Thailand, pemerintah meluncurkan inisiatif Baan Mankong “Perumahan yang Aman” guna sebagai penataan kawasan kumuh dan program perumahan sebelumnya dinilai kurang berhasil (Matsusawa, 2022). Kanada juga menjalankan National Housing Strategy (NHS), sebuah inisiatif jangka panjang yang dirancang untuk memastikan masyarakat dapat membeli dan memiliki hunian yang layak serta sesuai kebutuhan. Prioritas utama NHS diarahkan kepada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, lansia, masyarakat adat, serta penyandang disabilitas (Syaifi, 2025). Di sisi lain, Indonesia juga mengambil langkah strategis dalam penyediaan hunian terjangkau melalui program nasional Perumahan Rakyat Sejahtera, menargetkan pembangunan 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini resmi diluncurkan bersamaan dengan penyerahan simbolik 26.000 unit KPR FLPP serta 1.975 rumah bagi para guru ngaji dan dai (Shambodo et al., 2025).

Sebagaimana yang dikatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bahwa Program 3 Juta Rumah yang dijalankan Kementerian PKP selaras dengan Paket Kebijakan Ekonomi 2025 serta agenda penciptaan lapangan kerja. Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, program ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka jutaan peluang kerja dan menggerakkan ratusan industri terkait sektor perumahan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperluas akses rumah bersubsidi sebagai upaya menekan backlog perumahan. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah backlog perumahan di Indonesia tidak berada pada kisaran 9,9 juta hingga 12 juta sebagaimana diperkirakan sebelumnya, tetapi telah mencapai sekitar 15 juta unit. Angka ini menggambarkan antrean keluarga yang membutuhkan rumah baru. Sementara itu, backlog renovasi rumah berdasarkan data BPS mencapai kurang lebih 26 juta unit. Peningkatan jumlah backlog ini berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah keluarga baru. Memasuki awal tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 290 juta jiwa dengan total keluarga sekitar 93,1 juta, sehingga kebutuhan akan hunian layak terus meningkat secara signifikan. Di samping itu, pemerintah akan menjaga stabilitas suku bunga KPR FLPP bagi rumah bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan. Meskipun tujuan program tersebut sangat ideal, namun pada tingkat praktis implementasi program tiga juta rumah masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan.

Pertama, terdapat lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana, ditambah dengan waktu pelaksanaan yang terbatas, kekurangan tenaga kerja, dan persoalan status kepemilikan tanah. Kedua, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat. Ketiga, ketersediaan lahan kosong yang sesuai semakin sulit ditemukan. Keempat, proses birokrasi yang berbelit turut memperlambat pelaksanaan. Kelima, masih muncul masalah terkait transparansi dalam proses distribusi unit rumah. Berbagai permasalahan tersebut menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Program Perumahan Rakyat Sejahtera sebagai bagian dari target pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah menetapkan mekanisme pemberian subsidi perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa subsidi merupakan instrumen penting untuk membantu kelompok MBR memperoleh hunian yang layak.

Penelitian mengenai Program Tiga Juta Rumah memiliki urgensi yang signifikan karena program ini merupakan salah satu prioritas nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung capaian pertumbuhan ekonomi. Salah satu

tantangan strategis yang perlu dikaji adalah bagaimana pembangunan tiga juta unit rumah dapat berkontribusi secara optimal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8%. Selain itu, penting pula dianalisis bagaimana program ini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan, selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG) 1. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,36%, sehingga pelaksanaan program ini menjadi semakin relevan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 1. Jumlah Presentasi Penduduk Miskin Maret 2023-2025

<i>No.</i>	<i>Tahun</i>	<i>Modal Share</i>
1.	2022	9,54%
2.	2023	9,36%
3.	2024	8,57%
4.	2025	8,47%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1 memperlihatkan penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2025. Pada 2022 angka kemiskinan tercatat 9,54%, lalu turun menjadi 9,36% pada 2023. Tahun 2024 kembali menurun menjadi 8,57%, dan pada 2025 mencapai 8,47%. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Penurunan tersebut juga menggambarkan bahwa berbagai program pemerintah, termasuk Program Tiga Juta Rumah, berpotensi mendukung berkurangnya beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Program Tiga Juta Rumah dengan meninjau berbagai hambatan, tantangan, serta strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan, mengurangi backlog perumahan, dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menelaah implementasi pada Program Tiga Juta Rumah guna pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengacu pada Sugiyono (2020:64), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi suatu variabel secara apa adanya tanpa melakukan perbandingan maupun mencari hubungan antarvariabel. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data deskriptif berupa pernyataan tertulis maupun lisan dari narasumber, termasuk perilaku atau fenomena yang dapat diamati terkait implementasi program tersebut.

Selain itu, penelitian ini menerapkan metode studi literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan data konkret seperti UU Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dan Seluruh informasi tersebut kemudian dihubungkan dengan konsep dan temuan yang telah disajikan dalam literatur untuk memperkuat analisis penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Program Tiga Juta Rumah merupakan salah satu agenda prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait misi pembangunan infrastruktur sosial dan upaya pemerataan kesejahteraan. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan unit hunian secara fisik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini awalnya dijalankan sejak 2015 dengan nama Program Sejuta Rumah, namun hingga saat ini implementasinya masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural. Salah satunya adalah ketimpangan pendapatan yang masih relatif tinggi, terlihat dari rasio gini

Indonesia yang berada pada kategori sedang sejak 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat program belum sepenuhnya merata di seluruh kelompok masyarakat.

Program Perumahan Rakyat Sejahtera diluncurkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Tiga Juta Rumah diperkuat melalui skema pembiayaan tersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah menetapkan target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui FLPP tahun 2025. Pelaksanaan FLPP dan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran rumah bersubsidi diprediksi mampu menyerap jutaan tenaga kerja di sektor konstruksi dan industri terkait, misalnya jika setiap rumah butuh minimal 5 pekerja, maka 350.000 rumah bisa menyerap kira-kira 1,75 juta pekerja.

Gambar 1. Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)



Sumber: tapera.go.id

Berdasarkan Gambar 1, penyaluran FLPP tahun 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun secara umum bergerak naik dengan capaian tertinggi pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan penguatan dukungan pembiayaan perumahan bagi MBR, terutama melalui percepatan koordinasi dan implementasi program perumahan pada tahun tersebut. Dengan demikian target pembangunan tiga juta rumah ditetapkan sebagai program strategis nasional yang dirancang untuk direalisasikan sepanjang periode pemerintahan 2024–2029. Pemerintah menekankan bahwa penyediaan hunian subsidi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam hal ini tahap implementasi menjadi bagian krusial dalam proses kebijakan, karena efektivitas suatu program pada akhirnya dapat dinilai dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III untuk menilai sejauh mana komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi berperan dalam mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah.

1) Komunikasi

Pada Program Tiga Juta Rumah, aspek komunikasi terlihat dari bagaimana pemerintah pusat menyampaikan arah kebijakan melalui regulasi yang jelas, mulai dari UU No. 1 Tahun 2011 hingga Perpres No. 79 Tahun 2025 yang menegaskan sasaran program bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komunikasi kebijakan ini juga diperkuat oleh penegasan komitmen politik Presiden Prabowo dalam Asta Cita Nasional, yang menempatkan penyediaan rumah layak sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, kementerian terkait seperti Kementerian PKP dan BP Tapera secara konsisten menyampaikan informasi teknis mengenai target, alokasi anggaran, dan mekanisme bantuan, sehingga pemerintah daerah, pengembang, serta lembaga keuangan dapat memahami dan menerjemahkan kebijakan secara tepat. Di sisi lain, penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan KPR subsidi, ketentuan BSPS, dan standar kelayakan hunian juga menjadi bagian dari komunikasi publik yang mendukung transparansi. Secara keseluruhan, proses komunikasi dalam program ini telah mengarah pada penyampaian pesan kebijakan yang relatif jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung

pada konsistensi penyampaian dan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan instruksi yang diberikan.

2) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya finansial menjadi aspek kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Pemerintah menyediakan berbagai skema untuk menyesuaikan pembangunan dengan kemampuan ekonomi MBR, baik melalui pembangunan rumah susun dan rumah khusus yang dibiayai langsung oleh APBN/APBD, maupun rumah tapak yang dibangun pengembang dengan dukungan fasilitas fiskal dan pembiayaan seperti FLPP, pembebasan BPHTB, serta PPN 0%. Secara teknis, pembiayaan FLPP disusun melalui pola blended finance, di mana 75% didanai pemerintah melalui BP Tapera dan 25% berasal dari perbankan serta lembaga pendukung seperti PT SMF. Untuk memperkuat kapasitas implementasi di tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp57,7 triliun, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Anggaran ini disalurkan melalui sejumlah instrumen, termasuk pembiayaan MBR, FLPP, dukungan PT SMF, serta subsidi SBK dan SBUM. Di samping itu, alokasi bagi program BSPS juga meningkat hingga Rp8,6 triliun untuk memperbaiki hampir 374 ribu rumah tidak layak huni. Pemerintah pun menyediakan plafon kredit hingga Rp20 miliar per kontraktor dan menargetkan penyaluran pembiayaan sektor konstruksi mencapai Rp130 triliun, guna melibatkan UMKM secara lebih luas dalam pembangunan perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, dukungan sumber daya finansial telah diarahkan untuk mempercepat pencapaian target program.

Namun, di sisi lain implementasi program masih dibatasi oleh kendala ketersediaan sumber daya yang bersifat struktural. Satgas Presiden memaparkan bahwa kebutuhan anggaran nyata untuk mendukung program ini mencapai sekitar Rp53,6 triliun, tetapi pagu yang diberikan kepada Kementerian PKP pada tahun 2025 baru mencapai Rp5,27 triliun. Ketimpangan antara kebutuhan dan alokasi ini menimbulkan risiko keterlambatan pembangunan, terlebih anggaran tahun berikutnya belum dipastikan. Selain hambatan fiskal, keterbatasan lahan juga menjadi faktor signifikan. Ketersediaan tanah kosong semakin berkurang akibat tingginya konsentrasi kepemilikan lahan pada kelompok tertentu, yang menyebabkan harga tanah meningkat dan menyulitkan penyediaan rumah murah bagi MBR. Kondisi tersebut menambah beban biaya konstruksi sehingga bertentangan dengan prinsip keterjangkauan yang menjadi tujuan utama program. Hambatan sumber daya baik dalam bentuk anggaran maupun lahan menjadi isu krusial yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi Program Tiga Juta Rumah.

3) Disposisi

Sikap para pelaksana dalam program rumah bersubsidi mencakup tiga aspek utama, yaitu bagaimana mereka merespons kebijakan yang memengaruhi kemauan untuk menjalankannya, sejauh mana pemahaman mereka terhadap substansi kebijakan, serta nilai-nilai yang mereka anut dalam proses implementasi. Pelaksanaan kebijakan ini juga menuntut koordinasi yang kuat antarinstansi, seperti Bappeda, Dinas PKP, Dinas Sosial, BAZNAS, Bank Jambi, Tapera, hingga perguruan tinggi di daerah. Untuk memastikan ketepatan sasaran, diperlukan pembentukan Tim Satu Data Rumah Miskin yang berfokus pada validasi penerima manfaat serta pengawasan berbasis data DTKS secara transparan. Selain itu, distribusi tiga juta rumah yang telah dibangun harus diawasi secara intensif agar benar-benar menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyimpangan sasaran dapat terjadi, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan program karena kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum terpenuhi.

4) Birokrasi

Struktur birokrasi dalam Program 3 Juta Rumah menempatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai koordinator utama. Untuk memastikan tata kelola yang bersih, kementerian ini mendorong penerapan Zona Integritas pada 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), yang mencakup proses perencanaan hingga pengawasan agar pelayanan lebih cepat dan risiko korupsi dapat ditekan. Upaya ini juga sejalan dengan reformasi birokrasi yang didorong Kementerian PANRB agar lebih adaptif, efisien, dan berfokus pada penguatan kapasitas SDM sesuai arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo. Namun, sektor perumahan selama ini ditangani oleh enam kementerian atau lembaga berbeda, yang membuat koordinasi menjadi lambat dan proses administrasi semakin berbelit. Karena itu, asosiasi pengembang mengusulkan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai langkah penyederhanaan untuk mengintegrasikan pengawasan pembiayaan, pelaksanaan pembangunan, dan distribusi unit.

Tanpa reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi yang nyata, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah berpotensi terhambat dan sulit mencapai target.

D. Kesimpulan

Program Tiga Juta Rumah merupakan langkah strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mengurangi backlog nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif melalui penguatan pembiayaan, penyediaan rumah subsidi, serta perluasan akses hunian bagi kelompok rentan. Namun keberhasilannya masih dibatasi oleh kendala utama, yaitu keterbatasan lahan, ketidakseimbangan anggaran, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta risiko ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Oleh sebab itu, percepatan program membutuhkan birokrasi yang lebih sederhana, tata kelola data yang akurat, pengawasan yang ketat, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pelaksana. Dengan perbaikan tersebut, target tiga juta rumah berpotensi tercapai dan mampu berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan.

E. Referensi

- Astuti, Revi, Kadir, Abdul, Qomariyah, Emi, Ilmu, Jurusan, Negara, Administrasi, Tenggara, Sulawesi, Utara, Kabupaten Buton, Rumah, Bantuan, & Huni, Layak. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI. 10(3), 265–273.
- Ilmu, Jurnal, & Sosial, Kesejahteraan. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS RUMAH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN KAMARU KECAMATAN LASALIMU KABUPATEN BUTON. 5(2), 273–281.
- Matusawa, Minori. (2022). Baan Mankong “Secure Housing” Initiative in Bangkok, Thailand. Retrieved from <https://sites.utexas.edu/internationalplanning/case-studies/baan-mankong-secure-housing-initiative-in-bangkok-thailand/>
- Menteri PKP : Program 3 Juta Rumah Sejalan Dengan Paket Ekonomi 2025. (2025). Retrieved from Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman website: <https://pkp.go.id/berita/detail/menteri-pkp-program-3-juta-rumah-sejalan-dengan-paket-ekonomi-2025>
- Ramadhan, M. Nalla, & Sebayang, Asnita Frida. (n.d.). Strategi Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Cilegon. 35–42.
- Rameli, Norizan. (2022). Pembangunan Program Perumahan Miskin Bandar di Kuala Lumpur. 2, 84–93.
- Rasunto, Rahmat Perdana, Triyono, Agus, Tisnanta, H. S., Sumarja, F. X., & Prayoga, Satria. (2025). Systematic Literature Review : Dampak Kebijakan Perumahan Subsidi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 1465–1478.
- Saputra, Feriyansah Adi, Dewi, Rahma Cantika, Hendrawan, Aryo, Ratu, Dewi, Jati, Hapsari, Darmansyah, Firman Budhi, & Kunci, Kata. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. 2(1), 47–65.
- Sepna, Tiara Amelia. (2025). Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) dalam Mengatasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bukittinggi. 3(5), 252–257.
- Shambodo, Yoedo, Zarkasi, Irwa R., Asri, Rahman, Wijayanti, Tiwi, Sisingamangaraja, Jl, & Baru, Kebayoran. (2025). Komunikasi Pembangunan Program Sejuta Rumah pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 06.